

SKRIPSI

ANDRI SETIAWAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HONORER
DALAM HUBUNGAN KERJA DI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

KK

AN 09/02

Set

F



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HONORER
DALAM HUBUNGAN KERJA DI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SKRIPSI

**Digunakan Untuk Melengkapi Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H. M.Hum.
NIP. 131 878 983

Penyusun,



Andri Setiawan
NIM : 039814701

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka sebagai penutup akan saya kemukakan kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan pembahasan yang ada. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat saya kemukakan adalah :

1. Kesimpulan

- a. keberadaan pekerja honorer di Fakultas Ekonomi Unair adalah sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri swasta (PNS) maupun non calon PNS. Tenaga kerja honorer diangkat dan bekerja di Fakultas Ekonomi Unair berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Unair.
- b. Kelangsungan kerja atau lamanya seorang pekerja honorer dapat bekerja di Fakultas Ekonomi Unair tergantung dari kebijaksanaan pimpinan, apakah yang bersangkutan masih dipekerjakan atau hubungan kerjanya tidak dilanjutkan dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam bab terdahulu.
- c. Keterlibatannya terhadap peraturan kepegawaian Republik Indonesia terbatas pada tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi tenaga kerja honorer dikaitkan dengan peraturan-peraturan kepegawaian karena Surat Keputusan, yang mana dicantumkan dalam Diktum Memutuskan Pasal 5 (kelima) "Pegawai yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran (seperti yang tercantum pada peraturan kepegawaian), hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan perdata, namun apabila terjadi sengketa Perlindungan Hukum masih lemah, disebabkan ketentuan yang ada didalam surat keputusan pengangkatan tidak mengaturnya.

... untuk memberikan kejelasan bagi tenaga kerja honorer agar terdapat kejelasan dan perlindungan hukum yang kuat bagi tenaga kerja honorer.

- b. masalah kesejahteraan bagi tenaga kerja honorer hendaknya diperhatikan lagi, seperti kenaikan upah bagi tenaga kerja honorer mengingat kondisi perekonomian yang cepat berubah, apalagi PNS juga mengalami kenaikan gaji. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan kecemburuan antara tenaga kerja honorer dan PNS mengenai imbalan jasa, sebaiknya upah tenaga kerja honorer dinaikkan.
- c. tenaga kerja honorer harus meningkatkan kualitas kerjanya dan berupaya untuk tidak malas mengikuti pelatihan yang sering diadakan.
- d. tenaga kerja honorer hendaknya tidak tergoda untuk melakukan penyimpangan atau rayuan yang menjanjikan keuntungan pribadi.